

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- (3) Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran V.1 Peraturan Daerah ini;
 - b. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp	23.025.986.993.128,05	
b. Belanja Daerah	Rp	<u>21.552.895.838.935,00</u>	
Surplus			Rp 1.473.091.154.193,05
c. Pembiayaan Daerah			
- Penerimaan Daerah	Rp	3.748.512.147.298,33	
- Pengeluaran Daerah	Rp	<u>310.407.283.362,00</u>	
Pembiayaan Neto			Rp 3.438.104.863.936,33
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		Jumlah	Rp 4.911.196.018.129,38

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 62.635.917.878,05 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 22.963.351.075.250,00
b. Realisasi	<u>Rp 23.025.986.993.128,05</u>
Selisih lebih	Rp 62.635.917.878,05

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 4.677.283.563.599,33 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 26.230.179.402.534,33
b. Realisasi	<u>Rp 21.552.895.838.935,00</u>
Selisih kurang	(Rp 4.677.283.563.599,33)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 4.739.919.481.477,38 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan	(Rp 3.266.828.327.284,33)
b. Realisasi	<u>Rp 1.473.091.154.193,05</u>
Selisih lebih	Rp 4.739.919.481.477,38

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 3.748.512.147.298,33
b. Realisasi	<u>Rp 3.748.512.147.298,33</u>
Selisih	Rp 0,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 171.276.536.652,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 481.683.820.014,00
b. Realisasi	<u>Rp 310.407.283.362,00</u>
Selisih kurang	(Rp 171.276.536.652,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 171.276.536.652,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 3.266.828.327.284,33
b. Realisasi	<u>Rp 3.483.104.863.936,33</u>
Selisih lebih	Rp 171.276.536.652,00

(7) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2010 terdiri dari :

a. Saldo Kas di BUD per 31 Desember 2010	Rp 4.871.823.731.217,38
b. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran (Sisa UUDP tahun 2010)	Rp 39.372.286.912,00
SILPA Tahun 2010	Rp 4.911.196.018.129,38

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp 407.096.408.253.177,38
b. Jumlah kewajiban	Rp 589.437.245.479,00
c. Jumlah ekuitas dana	Rp 406.506.971.007.698,38

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2010 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2010	Rp 3.977.260.346.940,33
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 6.620.991.886.018,05
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	Rp (5.228.825.506.825,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp (286.687.222.897,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp 66.671.188.392,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2010	Rp 5.149.410.691.628,38

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2010 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara
 - Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah
 - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
 - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya
 - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
 - Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah
 - Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan
- e. Lampiran V : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah

Pasal 8

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2011

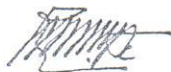
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 4

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010

Lampiran I : Peraturan Daerah Prov. DKI Jakarta
 Nomor : 4 TAHUN 2011
 Tanggal : 22 September 2011

Hal 1 dari 3

Nomor Urut	Uraian	Anggaran 2010	Realisasi 2010	%
1	2	3	4	5 = 4 : 3
1.1	PENDAPATAN	22,963,351,075,250.00	23,025,986,993,128.05	100.27
1.1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12,315,398,272,250.00	12,891,992,182,041.05	104.68
1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	10,083,000,000,000.00	10,751,745,151,388.10	106.63
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	407,910,000,000.00	439,210,908,273.00	107.67
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisah	212,840,000,000.00	223,005,615,402.00	104.78
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1,611,648,272,250.00	1,478,030,506,977.95	91.71
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	10,606,952,803,000.00	10,133,994,811,087.00	95.54
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	10,006,090,000,000.00	9,537,609,058,087.00	95.32
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	9,906,090,000,000.00	9,398,613,243,892.00	94.88
1.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	100,000,000,000.00	138,995,814,195.00	139.00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00	0.00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	600,862,803,000.00	596,385,753,000.00	99.25
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	600,862,803,000.00	596,385,753,000.00	99.25
1.2.3	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00	0.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	41,000,000,000.00	0.00	0.00
1.3.1	Pendapatan Hibah	41,000,000,000.00	0.00	0.00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00
2	BELANJA	26,230,179,402,534.33	21,552,895,838,935.00	82.17
2.1	BELANJA OPERASI	18,495,888,483,330.00	16,309,749,142,137.00	88.18
2.1.1	Belanja Pegawai	9,467,595,485,404.63	8,537,848,251,424.00	90.18
2.1.2	Belanja Barang	8,536,652,896,366.37	7,312,154,901,037.00	85.66
2.1.3	Belanja Bunga	9,946,000,000.00	7,421,194,046.00	74.61
2.1.4	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00
2.1.5	Belanja Hibah	433,653,000,000.00	423,468,762,400.00	97.65

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010

Lampiran I : Peraturan Daerah Prov. DKI Jakarta
Nomor : 4 TAHUN 2011
Tanggal : 22 September 2011

Hal. 2 dari 3

Nomor Urut	Uraian	Anggaran 2010	Realisasi 2010	%
1	2	3	4	5 = 4 : 3
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	46,691,101,559.00	27,517,450,000.00	58.94
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	1,350,000,000.00	1,338,583,230.00	99.15
2.2	BELANJA MODAL	7,632,052,730,574.00	5,243,146,696,798.00	68.70
2.2.1	Belanja Tanah	1,905,115,920,706.00	789,628,585,455.00	41.45
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	2,252,789,380,616.00	1,814,555,325,146.00	80.55
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	1,543,309,467,706.00	1,272,971,144,201.00	82.48
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,652,235,965,685.00	1,162,459,219,136.00	70.36
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	278,601,995,861.00	203,532,422,860.00	73.05
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	102,238,188,630.33	0.00	0.00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	102,238,188,630.33	0.00	0.00
2.4	TRANSFER	0.00	0.00	0.00
2.4.1	Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00
2.4.2	Bagi Hasil Retribusi Ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00
	Surplus / (Defisit)	(3,266,828,327,284.33)	1,473,091,154,193.05	0.00
3	PEMBIAYAAN	3,266,828,327,284.33	3,438,104,863,936.33	105.24
3.1	PENERIMAAN DAERAH	3,748,512,147,298.33	3,748,512,147,298.33	100.00
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	3,748,512,147,298.33	3,748,512,147,298.33	100.00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0.00	0.00	0.00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	481,683,820,014.00	310,407,283,362.00	64.44

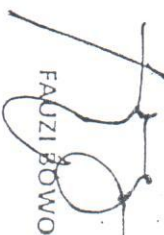
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010

Lampiran I : Peraturan Daerah Prov. DKI Jakarta
 Nomor : 4 TAHUN 2011
 Tanggal : 22 September 2011

Hal. 3 dari 3

Nomor Urut	Uraian	Anggaran 2010	Realisasi 2010	%
1	2	3	4	5 = 4 : 3
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	50.037,643,933,00	0,00
3.2.2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	290.000,000,000,00	80.912,965,000,00	27,90
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	64.683,820,014,00	52.456,674,429,00	81,10
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	127,000,000,000,00	127,000,000,000,00	100,00
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	4,911,196,018,129,38	0,00
	Pembayaran Neto	3,266,828,327,284,33	3,438,104,863,936,33	105,24

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA, JAKARTA


 FAUZI BOWO

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2010

Lampiran I.1 : Peraturan Daerah Prov. DKI Jakarta
 Nomor : 4 TAHUN 2011
 Tanggal : 22 September 2011

Kode	Ususan Pemerintahan Daerah	Pembiayaan (Setelah Perubahan / Realisasi / Bertambah (Berkurang))				SILPA TAB
		Penerimaan	Pengeluaran	Pembiayaan Netto		
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	
1	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN	3.748.512.147.298.33	481.683.820.014.00	3.266.828.327.284.33 (310.407.283.362.00)	0.00	
20	PELABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0.00	310.407.283.362.00	3.577.235.610.646.33	4.911.196.018.129.38 (4.911.196.018.129.38)	
380		3.748.512.147.298.33	171.276.536.652.00			

Hat. 33 dari 33

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA


 FAUZI BOWO

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2010

Lampiran I.2 : Peraturan Daerah Prov. DKI Jakarta

Nomor : 4 TAHUN 2011

Tanggal : 22 September 2011

Hal 4367 dari 4368

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, D.
 ORGANISASI : 1.20.380 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH / 7.00.00.00.0000.000

KODE REKENING	URAIAN	Angg. Stlh Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Bertambah / (Berkurang)	%	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	JUMLAH BELANJA	593.878.230,189,32	459.745.989,678,00	134.132.300,513,33	77,41	
	SURPLUS / (DEFISIT)	10.054.074,512,810,67	9.725.199,430,344,00	328.875,082,466,67	96,73	
1.20 380	PEMBIAYAAN DAERAH					
1.20 380	6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.748.512,147,298,33	0,00	(3.748.512,147,298,33)	0,00	
1.20 380	6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	3.748.512,147,298,33	0,00	(3.748.512,147,298,33)	0,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.748.512,147,298,33	0,00	3.748.512,147,298,33	0,00	
1.20 380	6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	481.683,820,014,00	310.407,283,362,00	(171.276,536,652,00)	64,44	
1.20 380	6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan	0,00	50.037,643,933,00	50.037,643,933,00	0,00	
1.20 380	6 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.	290.000,000,000,00	800.912,965,000,00	(209.087,005,000,00)	27,90	
1.20 380	6 2 3 Pembayaran Pokok Uang	64.683,820,014,00	52.456,074,429,02	(12.227,745,585,00)	81,10	
1.20 380	6 2 4 Pembayaran Pinjaman Daerah	127.000,000,000,00	127.000,000,000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	481.683,820,014,00	310.407,283,362,00	171.276,536,652,00	100,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	3.577,215,610,646,33	(310.407,283,362,00)	3.266,828,327,284,33	100,00	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

FAUZI BOWO

Lampiran 1.3 : Peraturan Daerah Prov. DKI Jakarta
 Nomor : 4 TAHUN 2011
 Tanggal : 22 September 2011


PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2010

Hal. 6623 dari 6624

Kode	Urutan Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan					Angg. Setelah Perubahan / Realisasi / Bertambah (Berkurang) / %				
	1		2		3		Jumlah 6 = 3 + 4 + 5			
					Pegawai	Jenis Belanja				
06	007	03	002					Modal		
				Monitoring / Pendampingan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk di Pabrik dan Pengawasan Penggunaan Logo Non CFC dan Non Halon & Non CFC	49.812.000,00	50.188.000,00	0,00	0,00	100,000,000,00	49,74
					17.550,000,00	32.188,000,00	0,00	0,00	49.738,000,00	
					(32.262,000,00)	(18,000,000,00)	0,00	0,00	(50,262,000,00)	
				INDUSTRI	35,23	64,13	0,00	0,00	49,74	0,00
2	07				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				KETRANSMIGRASIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	08				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				JUMLAH	1,396,784,318,574,53	8,628,326,304,783,37	7,776,131,328,362,00	17,801,241,951,720,00		
					1,069,946,269,623,00	7,385,697,179,964,00	5,332,125,302,118,00	13,787,768,751,705,00		
					(326,838,048,951,53)	(1,242,629,124,819,37)	(2,444,006,026,244,00)	(4,013,473,200,015,00)		
					76,50	85,50	68,57	77,45		

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA


 FAUZI BOWO

Lampiran 1.4 : Peraturan Daerah Prov. DKI Jakarta
 Nomor : 4 TAHUN 2011
 Tanggal : 22 September 2011

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN
 KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2010

Kode	Uraian	Angg. Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
13	SOSIAL	205.502.047.076,00	193.431.603.012,00	(12.070.444.064,00)	-94,13-
	JUMLAH	26.230.179.402.534,33	21.552.895.838.935,00	(4.677.283.563.599,33)	82,17

Hal. 5 dari 5

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA


 FAUZI BOWO

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 DAFTAR PIUTANG DAERAH
 PER 31 DESEMBER 2010

Lampiran 1.5 : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta
 Nomor : 4 TAHUN 2011
 Tanggal : 22 September 2011

NO	Uratan	Saldo Awal Per 1 Januari 2010	Penambahan 1 Jan - 31 Des 2010	Pengurangan 1 Jan - 31 Des 2010	Saldo Akhir Per 31 Desember 2010
1	2	3	4	5	6 = (3+4-5)
1	Piutang Pajak	195.039.335.833,48	75.097.734.123,52	0,00	270.137.069.957,00
2	Piutang Retribusi	73.584.497.004,00	40.162.665.259,00	0,00	113.747.162.263,00
3	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	29.421.561.813,00	0,00	498.366.409,00	28.923.195.404,00
4	Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	34.537.101.356,00	0,00	34.537.101.356,00
5	Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi	10.164.340.954,87	4.388.976.832,13	0,00	14.553.317.787,00
6	Bagian Lancar Piutang Kerjasama/Pemeliharaan Aset	74.206.503.160,95	0,00	61.545.567.381,95	12.660.935.779,00
7	Piutang Tagihan Aset Kredit Ex BPPN	91.472.221.236,00	0,00	4.640.430.685,00	86.831.790.551,00
8	Piutang PMP ke PT KBN di Bank DKI	175.000.000.000,00	0,00	175.000.000.000,00	0,00
9	Piutang Penjualan Saham	0,00	6.005.000.000,00	0,00	6.005.000.000,00
10	Bagian Lancar Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan	0,00	1.077.567.683,00	0,00	1.077.567.683,00
11	Piutang Lainnya :	65.807.925.732,82	327.502.272.853,18	1.863.887.585,00	391.446.311.001,00
	- Piutang Deviden/Kontribusi Perusahaan	1.531.399.397,00	0,00	1.200.000.000,00	331.399.397,00
	- Piutang Tunjangan	4.419.140.000,00	0,00	0,00	4.419.140.000,00
	- Piutang Tagihan Listrik dan Air	657.007.810,00	530.750.789,00	0,00	1.187.758.599,00
	- Piutang Sewa	2.784.173.259,00	2.306.982.368,00	0,00	5.091.155.627,00
	- Piutang di BLUD	39.293.535.726,00	7.310.162.979,00	0,00	46.563.698.705,00
	- Piutang Pelayanan Kesehatan	14.436.525.877,00	3.644.841.598,00	0,00	18.281.367.475,00
	- Piutang Hub. Istimewa kepada Dinas Kesehatan (Gakin, SKTM, dan Gizi Buruk)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Piutang lainnya di BLUD	24.817.009.849,00	3.465.321.381,00	0,00	28.282.331.230,00
	- Piutang Denda Kerjasama Pemakaian Sewa Aset	2.778.780.586,50	89.896.548.831,50	0,00	92.675.329.418,00
	- Piutang Lain-Lain :	14.383.888.954,32	227.457.827.885,68	663.887.585,00	241.177.829.255,00
	- Asuransi Dibayar dimuka	5.435.726.899,32	129.204.070,68	0,00	5.564.930.970,00
	- Belanja Dibayar di Muka	1.417.102.857,00	0,00	659.486.247,00	757.616.610,00
	- Uang Muka Kerja di SKPD	7.155.376.185,00	227.328.623.815,00	0,00	234.484.000.000,00
	- Uang Muka Kerja BLUD	375.683.013,00	0,00	4.401.338,00	371.281.675,00
	Jumlah	714.696.385.735,12	488.771.318.106,83	243.548.252.060,95	959.919.451.781,00

(Dalam Rupiah)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
 PER 31 DESEMBER 2010

Lampiran I.6 : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta
 Nomor : 4 TAHUN 2011
 Tanggal : 22 September 2011

No.	Jenis Investasi	Tahun Pertama Investasi	Nama Badan/lembaga/Phak Ketiga	Saldo Awal Per 1 Januari 2010	Penambahan 1 Jan s.d 31 Des 2010	Pengurangan 1 Jan s.d 31 Des 2010	Saldo Akhir Per 31 Desember 2010
1	Penyeretaan Modal Pada Perusahaan Daerah	3	4	5	6	7	8
1		1992	PDAM Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00
		1985	PD Dharma Jaya	26.952.597,344,00	15.033.500,475,00	0,00	41.986.097,819,00
		1982	PD Pembangunan Sarana Jaya	80.252.564,159,00	5.191.439,146,00	0,00	85.444.003,305,00
		1982	PD Pasar Jaya	390.352,047,496,69	65.347,287,116,31	0,00	455.699,334,613,00
		1991	PD PAL Jaya	90.401,342,399,00	23.597,059,429,00	0,00	113.998,401,828,00
	Jumlah Penyeretaan Modal Pada Perusahaan Daerah			587.558.551,398,69	109.169,286,166,31	0,00	697.127,837,565,00
2	Penyeretaan Modal Pada Patungan						
		1961	PT Pembangunan Jaya	132.803,498,792,28	477,025,415,923,72	0,00	609.828,914,716,00
		1972	PT Food Station Tipinang	9.157,154,148,51	1.695,303,582,49	0,00	10.852,457,731,00
		1973	PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung	40.000,000,000,00	47,136,122,729,00	0,00	87.136,122,729,00
		1970	PT Delta Djakarta Tbk	155.229,499,279,00	0,00	3.302,837,897,00	151.926,651,382,00
		1972	PT Bumi Grafika Jaya	1.200,000,000,00	0,00	1.200,000,000,00	0,00
		1991	PT Pembangunan Jaya Ancol	696,494,683,475,28	55,985,480,140,72	0,00	752,480,163,616,00
		1973	PT Determinan Indah	2.175,120,000,00	0,00	0,00	2.175,120,000,00
		1971	PT Ralax Armada	2.602,781,067,04	0,00	883,656,067,04	1.719,125,000,00
		1996	PT Rheem Indonesia	210,495,408,00	0,00	210,495,408,00	0,00
		2002	PT Kawasan Berkal Nusanlara	33,780,000,000,00	175,912,695,000,00	0,00	209,692,695,000,00
		1996	PT Alasaka Industrindo Tbk	4.885,650,000,00	0,00	0,00	4.885,650,000,00
		1971	PT Cernani Toka	27,059,360,000,00	0,00	0,00	27,059,360,000,00
		1971	PT Pakuan International	1.345,900,000,00	0,00	0,00	1.345,900,000,00
		1992	PT Grahassahari Suryajaya	3.991,000,000,00	0,00	0,00	3.991,000,000,00
		1993	PT Jaya Nur Sukses	6.750,000,000,00	0,00	0,00	6.750,000,000,00
		1989	PT Asuransi Bangun Askrida	8.680,000,000,00	0,00	0,00	8.680,000,000,00
		1997	PT Jakarta Properindo	540,565,496,726,71	23,405,562,203,29	0,00	563,971,058,930,00
		1993	PT Bank DKI Jakarta	905,219,684,019,37	310,615,085,126,63	0,00	1.215,834,769,146,00
		2004	PT Jakarta International Expo	39,375,000,000,00	0,00	0,00	39,375,000,000,00
		2004	PT Jakarta Tourisindo	464,069,665,838,24	6,645,699,442,76	0,00	470,715,365,281,00
		2004	PT Rumah Sakti Haji	51,157,222,000,00	0,00	0,00	51,157,222,000,00
		2008	PT Mass Rapid Transit Jakarta	87,593,888,322,92	9,876,983,619,08	0,00	97,470,871,942,00
	Jumlah Penyeretaan Modal Pada Patungan			3.214,306,099,077,35	1.108,298,347,747,69	5.596,989,372,04	4.317,007,457,453,00
	Jumlah Penyeretaan Modal Pemerintah			3.802,264,650,476,04	1.217,467,633,914,00	5.596,989,372,04	5.014,135,295,018,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO

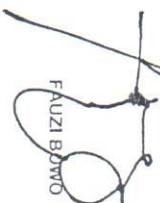


PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
PER 31 DESEMBER 2010

Lampiran 1.7 : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta
 Nomor : 4 TAHUN 2011
 Tanggal : 22 September 2011

NO	URAIAN	Saldo Awal			Penambahan 2010				Pengurangan 2010			Saldo Akhir
		per 31 Desember 2009	Belanja Modal	Kapitalisasi Non Belanja Modal	Aset Validasi 2010	Pengadaan Dari Dana Operasional BLUD	Koreksi Lain-Lain	Penghapusan	Reklas Ke Persediaan	Diserahkan Ke Masyarakat / Pihak Ke 3	Koreksi Lain-Lain	
A	B	C	4	5	D = 4+5+6+7	7	8	9	10	11	12	
1	Tanah	323.403.241.902.733,00	789.240.184.455,00	426.452.402,00	124.824.630.236,00	2.643.876.664.903,00	-	-	-	2.538.257.464.948,00	324.425.352.369.781,00	
2	Peralatan dan Mesin	6.828.287.969.246,00	1.814.555.325.146,00	44.461.342.464,00	11.879.174.345,00	1.169.613.315.242,00	14.291.426.588,00	34.725.050.262,00	11.385.856.430,00	937.030.327.708,00	8.187.508.855.229,00	
3	Gedung dan Bangunan	14.903.805.730.645,00	960.270.421.283,00	285.175.690.596,00	106.578.298.635,00	2.855.934.439.101,00	298.536.868.306,00	1.752.264.601,00	1.572.292.649,00	2.534.830.916.158,00	16.274.161.175.936,00	
4	Jalan, Jaringan, Irigasi	20.085.734.631.474,00	738.587.024.460,00	2.706.377.142,00	13.941.372.487,00	825.827.943.822,00	-	3.082.028.235,00	2.024.000,00	905.878.910.306,00	20.757.902.864.604,00	
5	Aset Tetap Lainnya	843.021.788.640,00	203.532.422.860,00	176.771.816,00	16.109.000,00	1.58.801.787.456,00	-	1.885.603.870,00	17.902.514.260,00	132.733.798.634,00	1.053.027.313.008,00	
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	842.230.374.977,00	736.591.318.594,00	20.424.123.968,00	-	154.913.582.724,00	-	-	-	703.819.643.522,00	1.050.709.755.741,00	
7	Jumlah Aset Tetap (1+2+3+4+5+6)	366.906.322.397.715,00	5.243.146.696.798,00	353.370.758.388,00	256.239.584.713,00	4.702.205.914,00	7.808.967.733.248,00	312.828.294.894,00	41.444.946.968,00	30.862.727.339,00	7.750.551.061.276,00	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,


 FAUZI BOWO

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2010

Lampiran 18 : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Nomor : 4 TAHUN 2011
Tanggal : 22 September 2011

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Saldo Awal Per 1 Januari 2010	Penambahan 1 Jan s.d 31 Des 2010	Pengurangan 1 Jan s.d 31 Des 2010	Saldo Akhir Per 31 Desember 2010
1	2	3	4	5	6
1	Tagihan Penjualan Angsuran	43.466.800,361,00	2.310.144,329,00	40.304.867,428,00	5.472.077,262,00
	- Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	929.756.254,00	2.310.144,329,00	3.239.900,583,00	0,00
	- Penjualan Angsuran Rumah Susun	42.537.044,107,00	0,00	37.064.966,845,00	5.472.077,262,00
2	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	3.581.270,146,14	8.989.498,287,86	12.570,788,434,00	0,00
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.307.570,861,780,00	1.963.773,841,410,00	67.947,811,000,00	3.203,396,892,190,00
	- Bangun Guna Serah (BOT)	279.984,753,000,00	82.530,350,572,00	0,00	362,515,103,572,00
	- Bangun Serah Guna (BTO)	1.006,197,508,780,00	2.469,840,000,00	0,00	1.008,667,348,780,00
	- Kerjasama Operasi (KSO)	21.388,600,000,00	25,082,078,000,00	0,00	46,470,678,000,00
	- Aset Kerjasama Pihak Ketiga	0,00	1.853,691,572,838,00	67,947,811,000,00	1,785,743,761,838,00
4	Aset Tidak berwujud	0,00	8.783,701,765,00	0,00	8.783,701,765,00
5	Aset di BP THR Lokasari	13.801,286,522,54	0,00	1.342,513,494,54	12,458,773,028,00
6	Aset Lain-lain	16.933,536,432,753,00	3.910,869,488,031,00	2.877,082,763,727,00	17,967,323,157,057,00
	- Aset - Air Mancur & Lansekap P. Diponegoro	5,009,905,500,00	0,00	5,009,905,500,00	0,00
	- Aset - Patung Panglima Sudirman	3,506,693,000,00	0,00	3,506,693,000,00	0,00
	- Aset - Air Mancur & Tugu Selamat Datang	14,310,515,001,00	0,00	14,310,515,001,00	0,00
	- Titipan Uang Sewa Rumah	4,622,806,473,00	172,934,000,00	4,795,740,473,00	0,00
	- Titipan Uang Santunan Pengosongan Rumah (Sengketa)	1,134,754,860,00	0,00	1,134,754,860,00	0,00
	- Aset Tetap Rusak Berat	262,094,571,125,00	36,137,921,930,00	24,562,544,000,00	273,669,949,055,00
	- Aset Tetap Belun Validasi	946,582,904,247,00	15,754,944,225,00	946,582,904,247,00	15,754,944,225,00
	- Aset Lain-lain di BLUD	3,548,392,265,00	0,00	0,00	3,548,392,265,00
	- Uang Konsinyasi Tanah	132,644,210,422,00	34,359,482,100,00	15,040,181,460,00	151,963,511,062,00
	- Piutang Kerjasama Pemanfaatan Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aset Fasos Fasum	13,938,491,283,612,00	3,466,503,689,782,00	0,00	17,404,994,973,394,00
	- Aset Kerjasama Pihak Ketiga	1,613,142,443,900,00	240,549,128,938,00	1,853,691,572,838,00	0,00
	- Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapi statusnya	8,447,952,348,00	108,531,052,00	8,447,952,348,00	108,531,052,00
	- Aset yang akan diserahkan ke instansi lain	0,00	117,282,856,004,00	0,00	117,282,856,004,00
	Jumlah	18,301,956,651,562,70	5,885,942,972,057,86	2,986,677,955,649,54	21,197,434,601,303,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI EDWAO

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
 PER 31 DESEMBER 2010

Lampiran 19
 Perubahan Daerah Provisi Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta
 Nomor : 4 TAHUN 2011
 Tanggal : 22 September 2011

No	Kode Rekening	Nama Kegiatan/Pekerjaan	2007	2008	2009	2010	Sudah selesai dikerjakan pada tahun	Jumlah akumulasi s.d 31 Des 2010 9/(+5-6-7-8)	Prosentasi Fisik Pekerjaan %	Jumlah yang dianggarkan dalam	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	DINAS PEKERJAAN UMUM		24.432.389.658	46.914.074.167	73.554.126.942	445.333.504.772	(172.970.985.730)	417.253.769.809			
1		Pembangunan jembatan leluq gong tahap V	24.432.389.658	46.914.074.167	73.430.058.942	433.173.969.717	(172.970.985.730)	404.979.506.734			
2		Pembangunan jembatan leluq gong tahap VI	12.241.115.853	6.809.939.828	7.316.453.918	1.311.407.522	(1.311.407.522)	-			
3		Pembangunan jembatan kawasan KBN Marunda		30.848.515.185	27.079.812.050	7.977.904.101	(65.906.231.336)	-			
4		Pelebaran jembatan langjung duran		4.972.136.202	27.048.445.970	2.457.036.426	(2.457.036.426)	-			
5		Pompa dan rumah pompa kapuk I dan I b	7.329.310.809	4.283.482.952	6.774.571.450	69.437.695.859	(19.076.018.461)	70.169.949.482			
6		Pembangunan jembatan FO Bandungan	4.861.962.956		732.253.803	49.707.015.325		50.260.321.128			
7		Pembangunan jembatan Tibagus Angke			553.305.803						
8		Pembangunan Muahola			96.772.000		(96.772.000)	-			
9		Pembangunan Jalan layang non tol Antasan-Blok M			81.766.110			81.766.110			
10		Pembangunan Jalan layang non tol Antasan-Blok M			49.059.666			49.059.666			
11		Pembangunan Jembatan Muara anjole			2.042.684.786			2.042.684.786			
12		Pembangunan Pump Gate Kapuk Poplar			20.850.556.539			20.850.556.539			
13		Pengelasan Sistem Pompa Air cileug			17.425.063.907			17.425.063.907			
14		Pembangunan Polder Kampong Benda			9.240.280.375			9.240.280.375			
15		Peningkatan kapasitas Long Silang Kali Samar dan Kali Cileug			12.200.298.544			12.200.298.544			
16		Pembangunan Bempas Lembang			23.518.757.518			23.518.757.518			
17		Pembangunan Bempas Lembang			20.896.084.018			20.896.084.018			
18		Pembangunan pompa gate pada saluran penghubung			25.961.154.039			25.961.154.039			
19		Peningkatan Sampah di Kali pasang			30.430.404.322			30.430.404.322			
20		Pembangunan dan pemeliharaan saluran di Jl. Thammin wahid Hasyim,Sunda dan sekitarnya			96.328.320.932			96.328.320.932			
21		Perbaikan dan pemeliharaan saluran di Jl. Thammin wahid Hasyim,Sunda dan sekitarnya			17.901.724.336			17.901.724.336			
22		Pembangunan dan pemeliharaan Saluran Sampah			15.699.494.650			15.699.494.650			
23		Pembangunan jalan dan saluran pengaman sejajar BKT (segmen Marturda-Rorotan)			14.069.575.092			14.069.575.092			
24		Pembangunan jalan dan saluran pengaman sejajar BKT (segmen Marturda-Rorotan)			10.206.563.541			10.206.563.541			
25		Pelebaran jalan kembangan raya			4.680.415.081			4.680.415.081			
26		Pemb. Jalan dan saluran pengaman sejajar BKT (segmen cakung timur-Raya Bekasi)			9.060.329.517			9.060.329.517			
27		Pemb. Jalan tembus Kelapa CadingBoulevard timur Terminal Pulo Gadung			13.572.882.446			13.572.882.446			
28		Program penataan dan pemeliharaan saluran air kawasan Monas sisi Utara			31.043.500.000			31.043.500.000			
29		kegiatan inveni dan PT. waduk Binaro R07/05 Kelurahan Binaro Jaksel			8.679.000			8.679.000			
30		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			50.000.000			50.000.000			
31		Jalan pada koridor busway			75.000.000			75.000.000			
32		Program pembangunan jalan dan jembatan keg invenirisasi dan pemeliharaan tanah FO Lubus anjole			160.088.140			160.088.140			
33		Program pembangunan jalan dan jembatan keg invenirisasi dan pemeliharaan tanah FO Lubus anjole			10.030.000			10.030.000			
34		Program pembangunan jalan dan jembatan keg invenirisasi dan PT on/off									
35		camp. jalan layang non tol anjole-blok M									
SUDIN PUL. TATA AIR JAKARTA UTARA					124.728.000			124.728.000			
inventarisasi lahan pantai publik kawasan Marunda wI Jakarta Utara					124.728.000			124.728.000			
SUDIN PUL. TATA AIR JAKARTA PUSAT											
001/Peningkatan Sistem Drainase dan konservasi air kawasan Monas sisi barat					9.471.733.983			9.471.733.983			
002/Peningkatan sistem drainase dan konservasi air kawasan Monas sisi barat					1.484.281.371.20			1.484.281.371.20			
003/Peningkatan sistem drainase dan konservasi air kawasan Monas sisi Selatan					2.336.657.062.94			2.336.657.062.94			
004/Peningkatan sistem drainase dan konservasi air kawasan Monas sisi Utara					1.619.361.335.86			1.619.361.335.86			
009/Peningkatan saluran kawasan Achmad Yani					1.321.665.642.45			1.321.665.642.45			

No	Kode Rekening	Nama Kegiatan/Pekerjaan	2007	2008	2009	2010	Sudut selesai dikerjakan pada tahun	Jumlah Akumulasi s/d 31 Des 2010	Prosentasi Fisik Pekerjaan %	Jumlah yang dianggarkan dalam	Keterangan
1		013/Konstruksi Salir Ji Surjono (lembu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		025/Konstruksi Salir Ji Surjono Sentong-urua Kendo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		035/Pembangunan Tumpu Sulu tembong/Suluan di sekianya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		036/Pembangunan Saluran Tuas/kebasan/kendong temasin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		051/Pembangunan saluran kawasan Kai Kozani	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		052/Pembangunan pompa, tdk Pompa, Pa dan penunuan US saluran PUG Kamahawi Bawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SUDIN PU TATA AIR JAKARTA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pembangunan/pemeliharaan salir Kawasan Blok M (Mekawati)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pembangunan/pemeliharaan salir Kawasan Lamandau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pembangunan/pemeliharaan salir Tanjung Barat/IB Simatupang Lumlutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG RENDAH		-	155.053.265.766	151.588.210.764	265.910.190.266	(317.173.457.856)	195.378.209.940	-	-	-
		Pereencanaan penyediaan usun Pulogebang	-	-	8.256.514.361	8.299.095.962	(1.994.231.447)	17.055.610.323	-	-	-
		Pemahangan tanah dan pemgangan waduk pluit	-	-	82.775.000	1.901.518.447	(95.154.463.250)	-	-	-	-
		Pembangunan gedung DPRD dan Balai kota stog greenbuilding	-	2.153.910.312	26.035.543.388	66.965.009.550	-	-	-	-	-
		Pembangunan gedung DPRD dan Balai kota DKI Jakarta	-	11.318.397.265	-	104.559.477.767	(629.033.103)	115.877.875.032	-	-	-
		Pereencanaan/DE Masjid KWK Jakarta Pusat	-	629.033.103	-	-	(349.674.000)	-	-	-	-
		Pembangunan/DE Masjid KWK Jakarta Pusat	-	1.908.905.982	-	-	(1.508.905.982)	-	-	-	-
		Pereencanaan/DE gedung dinas teknis Jat Baru	-	7.090.685.439	-	-	(2.698.685.439)	-	-	-	-
		Pembangunan/DE gedung dinas teknis Jat Baru	-	1.748.906.525	-	-	(1.748.906.525)	-	-	-	-
		Pereencanaan/DE gedung BPMS PKUD Prov DKI	-	2.139.444.037	-	-	(2.139.444.037)	-	-	-	-
		Pembangunan gedung Sarana wisata Islamic center	-	15.247.149.202	-	51.840.334.120	(15.247.149.202)	51.840.334.120	-	-	-
		Pereencanaan/DE gedung Sarana wisata Islamic center	-	776.842.318	-	9.162.938.730	(9.939.781.049)	-	-	-	-
		Pembangunan gedung Sarana sosial Islamic center Jakarta	-	55.316.889.420	15.612.103.000	-	(70.929.992.420)	-	-	-	-
		Pereencanaan/DE gedung Blok A Dinas Kesehatan	-	52.041.000	-	-	(1.363.464.000)	52.041.000	-	-	-
		Revisi master plan & perencanaan gndg PKP DKI Jakarta	-	1.363.464.000	-	-	(684.155.085)	-	-	-	-
		Pereencanaan/DE gedung perustakaan, lab dan kantor	-	894.155.085	-	-	(6.914.859.030)	-	-	-	-
		Pembangunan gedung perustakaan, lab dan kantor	-	6.914.859.030	-	-	(690.301.092)	-	-	-	-
		Pereencanaan/DE gedung kejar Jakarta Selatan	-	690.301.092	-	-	(10.446.606.776)	-	-	-	-
		Pembangunan gedung kejar Jakarta Selatan	-	8.665.176.961	1.781.429.815	-	(868.759.115)	-	-	-	-
		Pereencanaan/DE fasilitas rekreasi & olahraga Bokei Jak tim	-	868.759.115	-	-	(136.344.517.080)	-	-	-	-
		Pembangunan rusun Dinas Kebakaran Bokei Jak tim	-	36.524.671.880	99.819.845.200	-	(10.552.348.465)	10.552.348.465	-	-	-
		Pembangunan Rusun R. Kenia Dapreda Lt 2,3,13	-	-	-	9.410.532.640	(9.410.532.640)	-	-	-	-
		Polistasi/anal R. Fedra Cd Balai kota	-	-	-	2.718.936.585	(2.718.936.585)	-	-	-	-
3.	DINAS PERTAMAAN DAN PERAKAMAN		-	6.220.241.600	247.801.130	204.028.000	-	6.672.070.730	-	-	-
		Pemantuan/lembaan TPU Tanah Kusur	-	6.118.241.600	-	204.028.000	-	6.118.241.600	-	-	-
		Dinas Pertanian	-	102.000.000	-	-	-	306.028.000	-	-	-
		Pembuatan pagar pratelek (precast) TPU	-	-	247.801.130	-	-	247.801.130	-	-	-
4.	DINAS PENDIDIKAN		-	-	48.159.161.785	38.209.332.077	(26.119.212.785)	60.249.281.077	-	-	-
		DINAS PENDIDIKAN	-	-	38.423.738.785	33.475.182.427	(26.119.212.785)	45.773.708.427	-	-	-
		SMK 56	-	-	3.886.060.000	-	-	3.886.060.000	-	-	-
		SMK 44	-	-	6.594.878.000	-	-	6.594.878.000	-	-	-
		5.2.3.26	-	-	1.850.106.157	-	-	1.850.106.157	-	-	-
		5.2.3.26	-	-	1.913.640.000	-	-	1.913.640.000	-	-	-
		5.2.3.26	-	-	1.873.588.000	-	-	1.873.588.000	-	-	-
		5.2.3.26	-	-	14.023.195.000	-	-	14.023.195.000	-	-	-
		SMP 53	-	-	8.332.271.628	-	-	8.332.271.628	-	-	-
		Bahana Perencanaan Pembangunan	-	-	4.500.468.351	-	-	4.500.468.351	-	-	-
		Pembangunan Baru Gedung SDN Smanan	-	-	3.799.449.212	-	-	3.799.449.212	-	-	-
		Rehab total SDN Sunur Batu 14 dan 15	-	-	3.646.199.425	-	-	3.646.199.425	-	-	-
		Rehab total SDN Kelapa Gading Timur 01 dan 02	-	-	3.642.884.770	-	-	3.642.884.770	-	-	-
		Rehab total SDN Kalisar 01	-	-	7.336.231.139	-	-	7.336.231.139	-	-	-
		Rehab total gedung SMPN 34	-	-	10.349.939.530	-	-	10.349.939.530	-	-	-
		Pereencanaan pembangunan gedung sekolah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SUDIN PENDIDIKAN MENENGAH JAKARTA	-	-	9.735.423.000	4.734.149.650	-	14.469.572.650	-	-	-
5.	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA		1.115.043.438	-	56.580.774.356	27.757.435.842	(36.972.084.359)	48.481.169.287	-	-	-
		DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA	1.115.043.438	-	56.263.037.306	27.573.062.842	(36.972.084.359)	47.979.059.217	-	-	-

No	Kode Rekening	Nama Kegiatan/Pekerjaan	2007	2008	2009	2010	Sudah selesai dikerjakan pada tahun	Jumlah akumulasi s.d 31 Des 2010	Prosentasi Fisik Pekerjaan %	Jumlah yang dianggarkan dalam	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+5+7+8)	10	11	12
		Pembangunan dan peningkatan gedung olahraga kec Pulogadung Jakarta Timur	-	-	14.177.785.700	-	(14.177.785.700)	-	-	-	-
		Perencanaan perencanaan gelanggang remaja kec Pulogadung	264.232.313	-	9.581.232.850	-	(9.581.232.850)	-	-	-	-
		Pembangunan gelanggang remaja kec Tanjung Priok	-	-	4.601.213.000	-	(264.232.313)	4.601.213.000	-	-	-
		Pembangunan pelampung remaja & gedung judokarate kec Cempaka Putih	-	-	14.953.972.250	27.573.062.842	-	14.953.972.250	28.423.873.967	-	-
		AAP Dinas Olahraga dan Pemuda	850.811.125	-	-	-	-	-	-	-	-
		SUDIN OLARAHAGA JAKARTA BARAT	-	-	317.737.050	-	-	317.737.050	-	-	-
		Perencanaan Pembangunan gedung Olahraga	-	-	317.737.050	-	-	317.737.050	-	-	-
		SUDIN OLARAHAGA JAKARTA TIMUR	-	-	-	184.373.000	-	184.373.000	-	-	-
		DINAS KOPERASI DAN UKM	-	3.684.153.815	-	196.806.500	(3.684.153.815)	196.806.500	-	-	-
		Renovasi Blok Bantoro	-	112.326.125	-	-	(112.326.125)	-	-	-	-
		Pembangunan Pusatnya di Pulau Unung Jawa	-	3.571.827.690	-	196.806.500	(3.571.827.690)	196.806.500	-	-	-
		SUDIN KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	-	-	-	193.050.000	(193.050.000)	-	-	-	-
		SATPOL PP	-	-	3.490.492.900	148.475.050	(3.490.492.900)	148.475.050	-	-	-
		DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN	-	-	-	113.614.500	-	113.614.500	-	-	-
		DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN	-	-	283.447.188	-	(283.447.188)	-	-	-	-
		UPT. BALAI PENGIJIAN MUTU & PENGELUARAN HASIL PERIKANAN & KELAUTAN	-	-	283.447.188	-	(283.447.188)	-	-	-	-
		2.05.11.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rehab pagor keliling kantor UPT. BIPMPHIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UPT. BALAI BUUDAYA PERIKANAN	-	-	3.201.045.712	-	(3.201.045.712)	-	-	-	-
		5.2.3.26	-	-	3.157.501.712	-	(3.157.501.712)	-	-	-	-
		Pembangunan Gedung Promosi ikan	-	-	49.544.000	-	(49.544.000)	-	-	-	-
		Rehab pagor BBU Ciacas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UPT. PUSAT PERKAYUAN	-	-	-	35.860.550	-	35.860.550	-	-	-
		DINAS KEBERSIHAN	-	-	127.360.660	2.936.784.405	(127.360.660)	2.936.784.405	-	-	-
		DINAS KEBERSIHAN	-	-	127.360.660	-	(127.360.660)	-	-	-	-
		5.2.3.23.14	-	-	127.360.660	-	-	-	-	-	-
		Pembangunan pagor Arcen	-	-	-	2.936.784.405	-	2.936.784.405	-	-	-
		Sudin Kebersihan - Jakarta Barat	-	-	-	2.936.784.405	-	2.936.784.405	-	-	-
		Pengadaan Mandelair	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI	-	-	-	4.776.727.143	-	4.776.727.143	-	-	-
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI	-	-	1.092.848.550	1.092.848.550	-	1.092.848.550	-	-	-
		UPT. BALAI TEKSTIL	-	-	4.570.821.205	3.683.878.593	(4.570.821.205)	3.683.878.593	-	-	-
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	-	-	4.570.821.205	2.509.280.953	(4.570.821.205)	2.509.280.953	-	-	-
		BALAI KONSERVASI	-	-	4.570.821.205	-	(4.570.821.205)	-	-	-	-
		Konversi gedung ex Sudin Dikacapi Jakarta Barat	-	-	-	2.509.280.953	-	2.509.280.953	-	-	-
		UPT. ANJUNGAN TMI	-	-	-	2.509.280.953	-	2.509.280.953	-	-	-
		WALIKOTA JAKARTA UTARA	-	-	3.160.339.400	-	(3.160.339.400)	-	-	-	-
		SETKORADM JU	-	-	3.160.339.400	-	(3.160.339.400)	-	-	-	-
		Pembangunan gedung kantor Leturahan sunter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	18.687.200.000	279.883.992	12.692.925.507	-	(31.295.604.149)	364.405.350	-	-	-

tidak jadi dilaksanakan

dipindahkan ke asat-tergassma

No	Kode Rekening	Nama Kegiatan/Pekerjaan	2007	2008	2009	2010	Sudah selesai dikerjakan pada tahun	Jumlah Akumulasi s.d 31 Des 2010	Prosentasi Fisik Pekerjaan %	Jumlah yang ditangguhkan dalam	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	BLUD RIS PASAR KOLA		-	-	-	18.720.979.500	-	18.720.979.500			
22	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BLKD JAKARTA UTARA		-	-	-	113.690.000	-	113.690.000			
23	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP - JAKUT KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP - JAKGAR		-	-	-	17.199.343.740 86.625.000 85.640.000	-	17.199.343.740 86.625.000 85.640.000			
		Jumlah	69.115.313.295	314.844.857.040	458.270.204.642	912.299.025.286	1703.819.643.522	1.050.709.756.741	17.027.078.740		

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
Tanggal 31 Desember 2010

Lampiran I. 10 : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Nomor : 4 TAHUN 2011
Tanggal : 22 September 2011

0.	Maksud Mengadakan Dana Cadangan	Tahun Mulai Mengadakan Dana Cadangan	Saldo Awal Per 1 Januari 2010	Penambahan 1 Jan s.d 31 Des 2010	Pengurangan 1 Jan s.d 31 Des 2010	Saldo Akhir Per 31 Desember 2010	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Menanggulangi keadaan memaksa yang tidak dapat diduga sebelumnya yang tidak dapat ditanggulangi dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	2000	688.814.561.085,59	50.064.497.731,41	-	738.879.058.817,00	Sesuai Perda No.10/1999 tentang Dana Cadangan Daerah. DCD awal disediakan pada tahun anggaran 1998/1999 sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah)
	Membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran						Tambahan DCD selama Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp50.064.497.731,41.
	Jumlah		688.814.561.085,59	50.064.497.731,41	-	738.879.058.817,00	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BSWO

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2010

Lampiran I.11 : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta
 Nomor : 4 TAHUN 2011
 Tanggal : 22 September 2011

No.	Sumber Pinjaman Daerah	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp/Valas)	Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)	Persentase Bunga Pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Realisasi		Jumlah	
							Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Sisa Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	IBRD 3219 SLA 529	6 Juli 1990	USD 19.000.000,00	20 tahun	9,25	Proyek JUDP-II	2.823.849.814,00	502.943.562,00	0,00	0,00
2	IBRD 3246 SLA 538	15 Agustus 1990	USD 48.000.000,00	20 tahun	9,25	Proyek JUDP-III	10.631.788.944,00	1.304.643.683,00	0,00	0,00
3	OECEP IP-346 SLA 614	22 Desember 1989	JPY 1.388.000.000,00	20 tahun	9,25	Proyek GEIS	2.002.670.024,00	329.070.669,00	2.002.670.022,00	141.250.820,00
4	OECEP IP-365 SLA 650	14 Desember 1990	JPY 6.446.000.000,00	20 tahun	9,25	Proyek Jaringan Air Minum	1.056.021.760,00	173.114.232,00	1.056.021.758,00	74.075.526,00
5	OECEP IP-414 SLA 876	04 Nopember 1993	JPY 3.860.000.000,00	20 tahun	11,75	Waste Man Improv. Project	8.169.288.822,00	5.111.421.900,00	36.761.799.697,00	10.966.759.663,00
JUMLAH							24.683.619.364,00	7.421.194.046,00	39.820.491.477,00	11.182.086.009,00

(Dalam Rupiah)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

FAWZI BOWAS



PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS DAN
PER 31 DESEMBER 2010

Lampiran V : Perkiraan Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ikhtisar Laporan Keuangan

Tanggal : 4 TAHUN 2011

22 September 2011

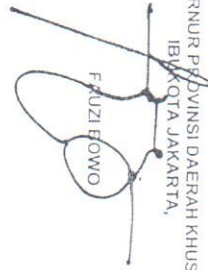
No.	Perusahaan Daerah	Lapang Tahun 2010/2009	Status	Aktiva Lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva	Keuntungan Jangka Pendek	Keuntungan Jangka Panjang	Total Keuntungan	Hak Minoritas	Modal Dasar	Tambahan Modal Dasar	Ekuitas Lainnya	Labai Diklaim	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Cost/Share	Keperluan Daerah	Jumlah	
1	Bidang Perkebunan	Ande/2010		15.516.784.050	182.568.267	164.035.105	15.863.387.422	14.348.032.214	-	14.348.032.214	-	611.139.000	20.000.000	38.037.881	548.708.327	1.217.605.208	99,93%	191.15 X 16	20 (17 X 11)	21 (19 X 20)	
2	Bidang Asuransi	Ande/2010		183.212.327	438.660.050	4.820.688	626.693.066	389.559.924	-	389.559.924	156.620.000	2.100.000	19.428.251	58.504.841	227.132.082	7,48%	8.680.000	8.680.000	-	8.680.000	
3	Bidang Kesehatan	Ande/2010		517.586.240	547.300.027	44.513.308	1.109.400.575	313.403.438	-	313.403.438	524.265.665	70.265.210	78.658.000	175.931.807	1.003.776	5.398.408	429.895.927	99,92%	1.191.000	1.191.000	1.191.000
4	Bidang Jasa Lainnya	Ande/2010		19.497.963	1.317.961.793	49.324.117	1.327.599.756	43.977.931	-	43.977.931	1.003.234.386	1.667.212.319	288.344.100	318.956.193	47.961.695	16.652.429	298.347.427	100,00%	39.375.000	39.375.000	39.375.000
5	Bidang Perumahan	Ande/2010		463.224.612	204.461.317	3.279.915	670.965.844	895.107.835	-	895.107.835	770.868.501	94.752.492	15.203.208	318.956.193	9.422.000	1.127.139.833	1.133.664.422	100,00%	113.988.402	113.988.402	113.988.402
6	Bidang Pendidikan	Ande/2010		206.628.780	516.537.012	1.408.910.044	2.132.075.836	373.819.254	-	373.819.254	1.858.256.582	1.267.526.603	1.024.600.000	2.038.534	9.422.000	455.699.135	100,00%	455.699.135	455.699.135	455.699.135	
7	Bidang Kesehatan Industri	Ande/2010		653.232.931	1.820.144.327	3.149.660	2.526.520.104	428.633.195	-	428.633.195	289.956.876	717.240.073	631.180.422	11.094.135	11.094.135	1.178.723.867	2,69%	3.298.900	1.221.195.529	3.228.892.429	
8	Bidang Angkutan Darat	Ande/2010		126.728.835	84.385.641	468.842.407	252.956.883	35.751.891	-	35.751.891	1.000.340	36.652.231	80.000.000	111.967.695	3.122	94.269.123	174.272.245	50,00%	209.692.695	209.692.695	209.692.695
9	Bidang Perikanan	Ande/2010		17.820.485.849	7.288.031.258	468.842.407	25.252.359.513	16.159.580.929	-	16.159.580.929	3.851.860.000	20.008.106.318	33.086.734	1.231.268.254	1.183.037.208	34.684.521	596.066.175	26,85%	6.209.805.548	6.209.805.548	6.209.805.548
10	Bidang Jasa Industri	Ande/2010		565.631.205	143.038.028	788.834.731	2.197.503.964	88.306.939	-	88.306.939	25.828.188	115.224.947	16.013.181	19.015.656	1.068.346	542.639.071	577.667.914	26,30%	4.885.600	151.928.661	151.928.661
11	Bidang Jasa Lainnya	Ande/2010		147.033.069	112.966.028	358.303.314	222.105.231	153.197.174	-	153.197.174	377.385.405	112.966.028	200.000	11.609.741	11.609.741	1.068.346	2.481.614	4,81%	27.039.300	4.885.600	4.885.600
12	Bidang Jasa Lainnya	Ande/2010		257.009.569	101.303.447	11.694.549	26.500.784	100.926.989	-	100.926.989	2.116.684	103.944.000	44.100	-	-	104.000.000	104.000.000	100,00%	1.119.150	27.039.300	27.039.300
13	Bidang Jasa Lainnya	Ande/2010		944.848.522	289.874.418	1.232.723.949	512.498.566	203.320.437	-	203.320.437	715.819.002	15.680.872	214.526.297	19.259.766	11.443.305	275.974.518	321.271.065	100,00%	34.120.110	151.928.661	151.928.661

(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Peusahaan Daerah	Laport Tahun	Status	Aktiva Lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Nilai Minoritas	Modal Dikretur	Tambahan Modal Dikretur	Ekuitas Lainnya	Liaba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Cost Method	Equity Method	Amortasi	
11	Badang Ruman SAKH	20/02/2009		20.195.486	86.115.587	-	106.311.074	6.615.265	7.082.188	13.697.452	-	100.308.278	-	-	(8.910.312)	91.397.966	51,00%	51.117.222	-	51.117.222	
1	PTIS Tjaj Jakarta			20.195.486	86.115.587	-	106.311.074	6.615.265	7.082.188	13.697.452	-	100.308.278	-	-	(8.910.312)	91.397.966	51,00%	51.117.222	-	51.117.222	
	Sisa Total 11			20.195.486	86.115.587	-	106.311.074	6.615.265	7.082.188	13.697.452	-	100.308.278	-	-	(8.910.312)	91.397.966	51,00%	51.117.222	-	51.117.222	
	Total Sekolah Badang Induk			19.078.607.598	7.527.513.288	468.882.407	27.279.223.823	17.270.720.014	4.064.743.740	21.344.463.754	54.777.528	3.871.233.783	1.217.526.010	-	329.746.603	(4.490.884.317)	6.576.390.733		356.780.072	4.657.744.223	5.014.135.295

(Dalam Ruan Riuan)

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2010


No.	Perusahaan Daerah	Sumber Lapken 2010/2009	Status	Pendapatan Usaha	Beban Usaha	Labar (Rugi) Usaha	Pendapatan Lain-Lain	Beban Lain-lain/ Hak Minoritas	Taksiran Pajak Penghasilan	Labar (Rugi) Setelah pajak
1	2	3		4	5	6	4	5	6	7
1	Bidang Perbankan									
1	PT Bank DKI	Audited 2010		1.930.513.219	(1.602.649.825)	327.863.394	20.083.322	-	(31.181.836)	316.764.880
	Sub Total 1			1.930.513.219	(1.602.649.825)	327.863.394	20.083.322	-	(31.181.836)	316.764.880
2	Bidang Asuransi									
1	PT Asuransi Bangun Askrida	Audited 2010		426.142.783	(377.631.772)	48.511.011	20.011.374	(49.597)	(12.151.343)	56.321.445
	Sub Total 2			426.142.783	(377.631.772)	48.511.011	20.011.374	(49.597)	(12.151.343)	56.321.445
3	Bidang Konstruksi									
1	PT Jakarta Properindo	Audited 2010		414.733.644	(227.604.669)	187.128.975		(128.759.695)	(20.933.573)	37.435.707
2	PT Jaya Nur Sukses	Audited 2009		418.852	(4.234.311)	(3.815.459)	801.233	(882.000)	(6.845.000)	(3.014.226)
3	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	Audited 2010		107.592.000	23.679.000	83.913.000	46.941.000	(5.042.354)	(505.817)	123.127.060
4	PD Pembangunan Sarana Jaya	Audited 2010		38.523.260	(31.298.773)	7.224.487	11.788.453			13.464.789
	Sub Total 3			561.267.756	(239.458.753)	274.451.003	59.530.686	(134.684.049)	(28.284.390)	171.013.250
4	Bidang Jasa Lainnya									
1	PT Jakarta International Expo	Audited 2007		136.690.927	(127.448.089)	9.242.838	259.482	(8.501.489)	(177.353)	1.000.832
2	PD AMI Jaya	Unaudited/2010		2.010.135.211	(1.986.850.254)	23.284.957	41.953.404	(8.366.410)	(1.773.597)	56.694.597
3	PD PAL Jaya	Unaudited/2010		31.920.859	(20.592.623)	11.328.236	1.910.623	(155.054)	(3.270.951)	9.812.854
4	PD Pasar Jaya	Unaudited/2010		307.622.987	(235.337.124)	72.285.863	14.274.670	(5.783.422)	(17.681.569)	63.095.744
	Sub Total 4			2.486.369.984	(2.370.228.090)	116.141.894	58.398.379	(22.806.376)	(21.129.870)	130.604.027
5	Bidang Perdagangan									
1	PT Food Station Tipinrang	Audited 2010		39.236.772	(31.794.141)	7.442.631	581.724	(65.766)	(1.656.827)	5.720.038
2	PD Dharmajaya	Unaudited/2010		55.995.957	(54.816.318)	1.179.639	581.724	(793.514)	(1.656.827)	967.849
	Sub Total 5			95.232.729	(86.610.459)	8.622.270	581.724	(859.280)	(1.656.827)	6.687.887
6	Bidang Pariwisata									
1	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	Audited 2010		921.926.345	(723.690.320)	198.236.025		(11.564.209)	(44.914.205)	141.757.611
2	PT Jakarta Tourindo	Audited 2010		111.906.674	(98.512.870)	13.393.804	1.471.890	(2.120.021)	(3.438.546)	9.307.127
3	PT Grahasahari Suryajaya	Audited 2009		54.289.392	(67.118.462)	(12.829.070)		(4.363.939)	(3.231.988)	(20.424.986)
4	PT Pakuan	Audited 2010		3.674.178	(5.243.660)	(1.569.482)	97.737	(57.106)		(1.528.951)

(Dalam Rubuan Rupiah)

Lampiran V.2 : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Nomor : 4 TAHUN 2011
Tanggal : 22 September 2011

No.	Perusahaan Daerah	Sumber Lapkeu 2010/2009	Status	Pendapatan Usaha	Beban Usaha	Laba (Rugi) Usaha	Pendapatan Lain-Lain	Beban Lain-lain / Hak Minoritas	Taksiran Pajak Penghasilan	Laba (Rugi) Setelah pajak
1	2	3		4	5	6	4	5	6	7
	Sub Total 6			1.091.796.589	(894.565.312)	197.231.277	1.589.627	(18.105.274)	(51.584.739)	129.110.891
7	Bidang Kawasan Industri									
1.	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Audited 2010		91.907.716	(46.783.859)	45.123.857	5.947.756	(6.703.838)	(9.365.824)	41.795.789
2.	PT Kawasan Berkal Nusantara	Audited 2010		208.232.720	(176.066.944)	32.165.776	23.798.052	(6.703.838)	(14.775.469)	34.484.521
	Sub Total 7			300.140.436	(222.850.803)	77.289.633	29.745.808	(6.703.838)	(24.141.293)	76.190.310
	Jumlah pindahan			6.891.463.496	(5.793.995.014)	1.050.110.482	189.920.920	(183.208.414)	(170.130.298)	886.692.690
8	Bidang Angkutan Darat									
1.	PT Ralax Amnada	Audited 2010		7.863.182	(9.582.274)	(1.719.092)	643.178	(2.080.000)		(3.155.914)
2.	PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta	Audited 2010		-	(19.673.333)	(19.673.233)	4.390.492	(15.684)		126.688
	Sub Total 8			7.863.182	(29.255.607)	(21.392.325)	5.033.670	(2.095.684)		126.688
9	Bidang Perceetakan									
1.	PT Bumi Grafika Jaya	Didivestasi 17/12/10		-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total 9			-	-	-	-	-	-	-
10	Bidang Aneka Industri									
1.	PT Delta Jakarta, Tbk	Audited 2010		547.816.338	(368.761.917)	179.054.421	15.405.331	(7.986.718)	(46.906.134)	139.566.900
2.	PT Alakasa Industrindo, Tbk	Audited 2010		845.070.373	(837.504.599)	7.565.774	118.721	(2.274.925)	(1.253.710)	4.155.880
3.	PT Cemani Toka	Audited 2010		390.466.255	(348.208.427)	42.257.828	43.598.411	(29.766.030)	(15.616.650)	40.473.559
4.	PT Delemman Indah	Unaudited 2009		-	(159.227)	(159.227)	17.360.815	(26.282.191)	6.517.220	(2.563.382)
5.	PT Rieeen Indonesia	Didivestasi 17/12/10		-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total 10			1.783.352.966	(1.554.634.170)	228.718.796	76.483.278	(66.309.864)	(57.259.274)	181.632.937
11	Bidang Rumah Sakit									
1.	PT RS Haji Jakarta	Audited 2005		90.100.871	(93.678.778)	(3.577.907)	781.414	(203.342)		(2.999.835)
	Sub Total 11			90.100.871	(93.678.778)	(3.577.907)	781.414	(203.342)		(2.999.835)
	Total Seluruh Bidang Industri			8.772.780.515	(7.471.563.469)	1.253.859.046	272.219.282	(251.817.304)	(227.262.884)	1.046.998.140

GUGUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO